BISNIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No.33 TAHUN 2014

Mospa Darma, Elyani

Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien, Program Studi Hukum

Email: jhonluckylucky@yahoo.com

Abstract

In the business world, in meeting the needs of producers where producers must race, which has become a benchmark for the economic doctrine where supply depends on demand and demand is based on the interests of society, but all market needs are determined by demand. regulations imposed by manufacturers and governments. get around the market formula for satisfaction, hygiene, health with the maximum content contained in halal products. Legislation implemented by the Government with reference to Law number 33 of 2014 provides limits on legal certainty for consumers.

Keywords: *Business strategy, Law no. 3 of 2014, halal.*

Abstrak

Pada dunia bisnis, dalam memenuhi kebutuhan produsen dimana produsen harus berpacu, yang telah menjadi tolak ukur pada doktrin ekonomi dimana penawaran tergantung pada permintaan permintaan berdasarkan pada kepentingan masyarakat, tetapi semua kebutuhan pasar ditentukan oleh permintaan. peraturan yang diterapkan oleh produsen dan pemerintah. menyiasati formula pasar untuk kepuasan, kebersihan, kesehatan dengan kandungan maksimal yang terdapat pada produk halal. Legislsi yng diterpkan oleh Pemerintah dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 memberikan batasan pada kepastian hukum bagi konsumen.

Kata Kunci: *Strategi bisnis, UU no. 3 tahun 2014, halal.*

1. Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia yang sangat kritis terhadap mengkonsumsi produk sehingga individu sangat memperhatikan tingkat kesehatan suatu produk, produk yang dikategorikan sebagai produk bersih tidak hanya secara fisik tetapi spiritual, perkembangan pertumbuhan muslim sangat pesat sehingga dalam memenuhi kebutuhannya memberikan peluang yang sangat baik. Penduduk Muslim mencapai 30

% dari jumlah populasi dan diperhitunbgkan pada tahun 2025 populasi Islam akan bertambah menjadi 35 %. Sehingga, bukan hal asing bilakebutuhanbarang halal bertambah meningkat, dan jugaproduk halal yang dibutuhkan. Menjadi pasar penting Industri halal sertayang berhubungan dan bisnis yang memberikam profit, serta kemampuan investasinya yang banyak (Yusoff dan Adzharuddin, 2017:1). Padahal, sesuai Husein Elasrag (2016: 7) di era 2050

penduduk Islam diprediksi sampai 2,6 miliar. Produk sesuai mekanisme akan paruh pada pasar yang sudah turut pada regulasi dan campur tangan pemerintah pada setiap tingkatan baik di masyarakat sosialis, totaliter maupun masyarakat liberal modal. Islam, sejak awal, dan diyakini merupakan hak individu di market global dan market bebas, namun pada prinsip dan aturan yang ditentukan Syariah. Peraturan syariah ini yaitu: pertama, perdagangan cuma bisadikerjakan dengan barang-barang yang halal, dibolehkan oleh syariah, atas dasar pilihan bebas dan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Kedua, transaksi tunai. Menyertakan pengiriman barang dagangan sesungguhnya dan pembayaran secara penuh dan bersamaan.

2. Tinjauan Pustaka

Secara metode kesehatan makan secara sehat yaitu mengonsumsi makanan pada volume yang tepat dari seluruh golongan makanan secara berurutan untuk memastikan dimana tubuh individu cukupi dengan baik dan dapat berguna secara layak, sesuai dengan gaya hidup dan tingkat kegiatan. Berkaitan dengan proses pengolahan makanan, khususnya Labensky et al. (1994) disimpulkan sanitasi merupakan penciptaan atau pemeliharaan keadaan yang

sanggup menghalangi kontaminasi makanan atau penyakit yang penyebabnya adalah makanan. Sesuai Irham Fahmi, pengertian manajemen produksi yaitu ilmu manajemen yang meneliti dengan habis bagaimana manajemen produksi perusahaan memakai pengetahuan dan seni yang dimilikinya dengan menunjukkan dan mengelola manusia dalam memperoleh hasil produksi yang diharapkan. Heizer dan Reider pendapat Heizer dan Reider, Manajemen Produksi adalah serangkaian aktifitas memperoleh nilai berupa barang dan jasa dengan menggantikan mengubah. Menurut Handoko, pengertian manajemen produksi dan operasional yaitu segala cara untuk mengusahakan penggunaan secara maksimal segala sumber daya (faktor produksi); tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya, dalam mekanisme merubah bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Sofyan Assauri Menurut Sofyan Assauri, pengertian manajemen produksi yaitu kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan pemanfaatan berbagai sumber daya; sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya keuangan, dan bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah pemanfaatan barang atau jasa. Ilmu sanitasi adalah

pelaksanaan pedoman yang akan menolong meningkatkan, memelihara, atau memulihkan kesehatan yang baik pada manusia (Jenie, 1996 dalam Purna wijayanti 2001)

1. Sesuai Kamus Umum Bahasa Indonesia” Pasar pada dasarnya terdapat pengertian diantaranya :
  - 1) Lokasi jual beli, penghujung ahad, lokasi perdangan yang dilangsungkan oleh organisasi dan lainnya dengan tujuan untuk mencari nafkah.
  - 2) Merupakan wadah hiburan yang dilakukan pada malam hari selama beberapa hari. Menurut Mankiw (2007) pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu.
2. Pembeli sebagai gabungan yang menetapkan permintaan produk dan penjual sebagai gabungan yang menetapkan penawaran produk (Zayinul Fata, 2010).
3. Pandangan Kotler Dan Armstrong "1999" Apa yang merumuskan pasar adalah sekelompok konsumen aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Besar kecilnya pasar itu sendiri berpatokan pada jumlah orang yang menunjukkan kepentingan, memiliki keahlian untuk melakukan barter.

Sebagian besar pemasar melihat penjualan sebagai industri dan konsumen sebagai pasar, di mana produsen menyerahkan produk dan jasa yang mereka hasilkan dan mengomunikasikannya atau mengirimkannya ke pasar; dalam kompensasinya, mereka akan memperoleh uang dan informasi dari pasar "Kotler dan Armstrong, 1999".

4. Menurut Kotler, 2002 Pasar adalah wadahmyata di mana pembeli dan penjual bertemu untuk bertukar barang dan jasa.
5. Menurut W.Y. Stanton Pengertian pasar yaitu suatu lokasi yang bermaksud untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa, dalam hal ini mengutamakan kepuasan pembeli.
6. Menurut William J. Stanton Menyatakan bahwa pasar adalah sebuah lokasi dimana terdapat sekelompok manusia yang hendakmentransaksikan uangnya, atau bisa disebutkan pasar adalah tempat terjadinya aktifitas jual beli dengan alat tukar “uang”.
7. Menurut Philip & Duncanadan Pendapat ini didukung pada tahun 2005 oleh Philip & Duncanadan yang mendefinisikan pasar sebagai sesuatu yang dipakai untuk meletakkan barang-

barang yang diperlukan oleh konsumen. Sehingga kedua pendapat W.Y. Stanton dan Philips & Duncan dan percaya dimana pasar yaitu lokasi meletakkan barang untuk dibeli konsumen.

8. Menurut H. Nystrom Pasar adalah suatu tempat tertentu yang dipakai sebagai tempat terjadinya distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, pasar adalah tempat terjadinya transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen.
9. Menurut Handri Ma'aruf "2005" Pandangannya pasar mempunyai tiga maksud yaitu:
  - 1) Pasar dalam pengertian "tempat" adalah tempat pertemuan penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
  - 2) Pasar dalam pengertian "interaksi permintaan dan penawaran", yaitu pasar merupakan lokasi terjadinya transaksi jual beli.
  - 3) Pasar dalam pengertian "sekumpulan anggota masyarakat yang memiliki kepentingan dan daya beli", pengertian ini mengarah pada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang membutuhkan suatu barang atau jasa dan mempunyai kemampuan untuk membelinya.
10. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika Serikat atau Asosiasi Pemasaran Amerika Merupakan wadah untuk melakukan aktifitas kegiatan jual beli lintas ditujukan secara special untuk barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar produk halal memberikan solusi bagi semua pihak yang membutuhkannya sebagai produk konsumsi yang higienis dan sehat sehingga produk halal menjadi kriteria suatu produk dinyatakan sebagai produk yang bersih baik dalam bentuk maupun non bentuk.
11. Menurut Kotler dan Armstrong (2008: 177) Konsumen melakukan keputusan dalam pembelian dan konsumen tak luput melalui beberapa tahapan yaitu mengerti permasalahan yang dihadapi hingga sampai sepakat pembelian konsumen dan keputusan pembelian merupakan tahapan proses keputusan dimana konsumen benar-benar membeli produk.
12. Menurut Olson (dalam Sangadji, 2013:332) keputusan pembelian yang dimaksud yaitu suatu proses pemecahan masalah yang terdiri dari menganalisis atau mengenali kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian sumber pemilihan alternatif

pembelian, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.

13. Pendapat Hasan (2013:181), keputusan pembelian yaitu keputusan dalam memilih suatu perbuatan atas beberapa pilihan dalam membeli produk dan jasa yang akan dikonsumsi. Mengonsumsi makanan halal wajib bagi setiap muslim. Hukum syara telah mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan pangan manusia sebagaimana tertuang pada Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 88. Dijelaskan oleh Al-Qur'an dimana makanan halal yaitu segala varian makanan, dikecualikan yang secara khusus dinyatakan merupakan makanan halal. Kriteria keharaman atau sebagai pelanggaran yang dilarang atau melanggar hukum syariat Islam dan label halal adalah salah satu pedoman didalam menentukan kelayakan suatu produk secara halal.

3. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dengan cara yuridis empiris dengan mempergunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia adalah merupakan penduduk muslim yang mayoritas sehingga mempengaruhi akan budaya yang tumbuh di Indonesia, sesuai yang diterangkan pada Al Qur'an surah Al Maidah ayat 3. Untuk membedakan produk dipasaran sehingga umat Islam dapat membedakan akan produk yang layak untuk dikonsumsi dan mempermudah masyarakat Muslim untuk mengevaluasinya.

Budaya di Indonesia berpengaruh besar akan budaya yang di munculkan oleh masyarakat yang dominan dan mayoritas. Dalam budaya Islam produk yang dikonsumsi akan mempengaruhi amal ibadahnya kepada Robbnya sebab produk yang dikonsumsi tersebut masuk dan tumbuh menjadi inti sel biologis bahkan dapat menularkan kepada keturunan. Produk halal merupakan visi dan misi umat ke masa depan dan secara otomatis menentukan peradaban di masa depan. Kriteria Produk olahan seperti obat-obatan, minuman, makanan, obat-obatan, maupun kosmetika, Dapat dihipunkan pada golongan musy-tabihat (syubhat), terlebih lagi produk itu dari negara yang mayoritas penduduknya non muslim, meskipun mentah. Komposisinya merupakan barang yang suci dan halal.

Halal (Bahasa Arab: *halāl*; 'dipersilahkan') yaitu semua benda atau aktifitas yang diperbolehkan untuk digunakan atau dipakai dalam Islam dan halal sesuai jenis dan caranya. Setara dengan halal adalah *thayyib* yaitu 'baik'. Bukan hanya sekedar halal makanan dan minuman tersebut namun musti *thoyyib*.;sesuai standarkah untuk di konsumsi secara kesehatan.

Halal adalah bagian dari lima hukum, yaitu: *fardhu* (wajib), *mustahab* (dianjurkan), *halal* (dibolehkan), *makruh* (dibenci), *haram* (dilarang). Berkaitan dengan manusia, Al-Qur'an memakai tiga istilah utama. Pertama, memakai kata yang berasal dari huruf alif, nun, dan sin, seperti kata *insan*, *ins*, *nas*, dan *unas*. Kedua, memakai kata *basyar*. Ketiga, memakai kata *Bani Adam* dan *zurriyat Adam* dan semua yang halal itu baik dan baik, tetapi beberapa hal lebih baik dan lebih baik dari yang lain, lebih bersih, lebih murni dan lebih murni dari yang lain.

Panganan mempunyai pengaruh besar bagi hidup seseorang, baik halal maupun haram. Makanan halal mempunyai beberapa kategori, yaitu tidak berisikan benda dari hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi atau tidak disembelih sesuai syara, tidak berisikan benda najis,

tidak diolah memakai bahan atau peralatan yang najis, dan pengolahannya tidak bersinggungan dengan bahan makanan najis dan garam (Zulaekah dan Kusumawati 2005) Sayyid Qutb menjelaskan bahwa makanan yang dibolehkan atau halal dari segala sesuatu di bumi kecuali yang sedikit dilarang karena berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya dan telah diabaikan dalam teks syara' berhubungan dengan iman, sekaligus. sesuai dengan fitrah alam dan fitrah manusia.

Monzer Kahfi memberikan terobosan dengan asumsi sebagai berikut, yaitu: Masyarakat yang menjalankan Islam, zakat wajib, tidak ada riba dalam perekonomian, mudharabah terwujud dalam perekonomian, pelaku ekonomi mempunyai sifat memaksimalkan. Siddiqi menerangkan dimana tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna sesuai syarayaitu:

- a. Secara sederhana terpenuhi kebutuhan hidup.
- b. Kebutuhan keluarga terpenuhi
- c. Secara jangka panjang kebutuhan terpenuhi.
- d. Terhadap keluarga yang ditinggalkan kebutuhan terpenuhi.
- e. Sesuai dengan jalan Allah bantuan sosial dan donasi diberikan, menurut

Ibnu Khaldun, saat mazhab para imam fiqh merupakan ilmu khusus atas pengikutnya dan tidak ada cara untuk berjihad, para ulama melakukan tandzir atau persamaan untuk menghubungkan mereka dan memilihnya ketika tidak jelas setelah menyederhanakan tertentu. dasar mazhab mereka.

Pengembangan fiqh melalui tandzir dan isytibāb (diurutkan) dan para ulama kemudian memasukkan metode baru pada ilmu fiqh yang dikatakan al-Qawāid al-Dhawābith atau al-Furūq dan mazhab Hanafi diketahui merupakan sekolah pertama yang memperkenalkan ilmu ini. Ibnu Khaldun menggunakan istilah "jiwa rasional" (an-nafs an-natiqah, jiwa rasional) untuk menunjukkan perbedaan antara manusia dan hewan. Perlindungan terhadap konsumen muslim merupakan hal yang urgen di Indonesia, sebab mayoritas konsumen Indonesia yaitu umat Islam, sehingga konsumen muslim musti memperoleh perlindungan atas barang dan jasa baik makanan maupun obat-obatan yang cocok atas hukum Islam. Pada lain hal pemerintah musti mengayomi konsumen Islam di Indonesia. Perlindungan kehalalan produk melalui LPPOM MUI atau Majelis

Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1989.

Fungsi LPPOM MUI untuk perlindungan atas konsumen Islam dalam mengkonsumsi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Sementara itu, World Halal Agency (WHC) World Halal Council (WHC) didirikan pada tahun 1999 di Jakarta yang diprakarsai oleh berbagai negara, diantaranya Indonesia. Fungsi lembaga ini merupakan federasi badan sertifikasi halal di seluruh dunia setelah memperoleh pengakuan internasional dan global untuk sertifikasi dan akreditasi halal mereka. Lukman Hakim, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Zuhri menyebutkan, dari jumlah produk makanan dan minuman yang di pasarkan di seluruh Indonesia, baru ribuan yang memiliki sertifikat halal dari LPPOM. -MUI, yang hanya sekitar 20 persen dari semua yang telah disertifikasi halal oleh MUI.

Label halal adalah jaminan dari lembaga yang berwenang seperti Lembaga Penelitian Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memastikan bahwa produk tersebut telah lulus uji kehalalan menurut syariat Islam.

Sehingga LPPOM MUI dibentuk untuk menciptakan rasa damai dan ketenangan jiwa kepada masyarakat mengenai produk yang mereka konsumsi. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta menaikkan nilai plus bagi atas pelakunya. Upaya untuk memproduksi dan menjual produk halal. Pencantuman label halal pada setiap bungkus produk bertujuan untuk menunjukkan kepastian status kehalalan produk dan menenteramkan benak konsumen muslim mengenai tata cara, bahan baku, dan pengolahannya.

Persyaratan kehalalan suatu produk antara lain:

- a. Bebas dari kandungan dari babi dan anjing.
- b. Bebas dari komposisi yang diharamkan seperti dari anatomi tubuh manusia, darah, kotoran, dan sebagainya.
- c. Segala benda dari hewan yang dihalalkan dengan cara penyembelihan yang halal.
- d. Seluruh wadah penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan pengangkutan bukan bekas babi. Apabila

digunakan bekas hewan dan benda yang haram maka harus disamak terlebih dahulu.

- f. Segala panganan dan minuman yang tidak terkontaminasi dengan khamar.
- g. Produk yang dikonsumsi tidak terindikasi benda yang bersifat merusak, berbahaya, atau merusak penggunaannya.

Langkah-langkah berikut biasa dipakaidalam menyusun Haram Analysis Critical Control Point (HrACCP).

1. Identifikasi dan akses semua materi yang najis dan najis.
2. Menetapkan titik kendali.
3. Menetapkan prosedur pemantauan.
4. Ambil usaha memperbaiki.
5. Memiliki metode perekaman
6. Buat Prosedur Verifikasi Penetapan Jumlah Sertifikat Halal yang Diterbitkan oleh Mui tahun 2011-2018.

Gambar 1. Jumlah Produk Yang Bersertifikat Halal Mui Tahun 2011-2018

Gambar 2. Jumlah Produk yang bersertifikat halal MUI

Kontribusi Subsektor Industri Kreatif di Indonesia adalah sebagai mana terlihat pada tabel 1 dibawah:

Tabel. 1 Kontribusi Subsektor Industri Kreatif di Indonesia

NO	Industri Kreatif	Persentase 2015	Persentase 2016
1	Kuliner	41,15%	41,69%
2	Mode	18,30%	18,15%
3	Kerajinan	15,00%	15,17%

Sumber : BEKRAF

Hukum Nasional Resolusi Majelis Umum PBB N.A/RES/39/248 Tahun 1985 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen dan landasan hukum sertifikasi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Inklusi Penulisan Halal pada Label Pangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Kondisi Terbungkus (BDKT), label informasi pangan berupa tulisan, gambar, dan kombinasi yang memberikan keterangan menurut akanperaturan perundang-undangan dibubuhkan pada kemasan.

Kebutuhan pokok setiap manusia yang harus selalu dipenuhi yaitu. Sesuai pada aturan yang mengatur tentang hak untuk memperoleh pangan, yaitu pada 27 UUD 1945 dan dalam Deklarasi Roma (1996). Dasar hukum dengan terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Merupakan kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai makna dan peran yang begitu penting bagi kehidupan suatu bangsa.Stok pangan yang lebih kecil dari yang dibutuhkan dapat menimbulkan

ketimpangan ekonomi. Konflik sosial dan politik juga bisa terjadi bila ketahanan pangan terganggu. Keadaan pangan yang kritis justru bisa membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyatakan: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Pasal 5 (1) Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan JPH. Aspek yang menjadi tinjauan dalam pelabelan halal, yaitu: Sebuah. Proses Manufaktur Proses manufaktur atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal harus menjaga hal-hal sebagai berikut:

- 1) Proses pembersihan hewan yang akan dibersihkan, hewan yang mati setelah dipotong.
- 2) Campuran benda yang dipakai dalam proses produksi bukan berasal dari benda atau zat ilegal dan pengembangannya.
- 3) Air yang dipakai untuk bahan pembersih musti mutlak atau bersih dan mengalir.
- 4) Pada teknis produksinya tidak terkontaminasi atau dekat terhadap benda haram atau najis.

Bahan Baku Utama, bahan baku produk yaitu bahan utama yang dipakai pada proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi.

Bahan tambahan produk yaitu bahan yang hanya berupa tambahan yang bukan sebagai bahan utama produksi.

Bahan Penolong atau hanya berfungsi sebagai mempercepat ataupun memperlambat didalam proses produksi atau rakayasa dan merupakan bahan yang tidak tergolong dalam kategori bahan baku atau bahan tambahan. Rekayasa genetika yaitu proses untuk memperoleh produk pangan yang memiliki kualitas tinggi yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari satu jenis hayati ke jenis lain yang berbeda atau sama.

Pada PP No. 69 Tahun 1999 pasal 1 pangan halal yaitu pangan yang tidak berisikan unsur atau bahan yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang berkaitan dengan bahan baku pangan maupun bahan penolong lainnya, termasuk bahan pangan yang proses secara rekayasa genetika. dan iradiasi pangan serta pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Makanan halal adalah segala jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang dilarang haram dan atau diolah menurut Islam. (Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan MenagNo./me.kes VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 pasal 18. Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait makanan halal di Indonesia adalah sebagai berikut: Peraturan Menteri Kesehatan RINo. 280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan tentang Peredaran dan Pelabelan Pangan Yang Mengandung Bahan Asal Daging Babi.

Seksi 2 :

- 1) Pada tempat atau kemasan pangan produksi dalam negeri atau impor yang berisikan bahan asal daging babi, wajib dilampirkan tanda peringatan.
- 2) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 518 harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi: Berisi Babi dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran minimal Universe Medium Corp 12 di garis persegi panjang berwarna merah.
- 3) Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang Label Pangan dan Iklan Pasal 2 menyebutkan bahwa kata-kata gambar

logo simbolik dan sebagainya yang terdapat pada label atau iklan harus sesuai dengan asal usul, sifat, komposisi, kualitas dan kegunaan makanan.

- 4) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 427/Menkes/SKB/8/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Pangan. Pasal 1 Tulisan halal adalah tulisan yang dicantumkan pada label/tanda yang menjamin kehalalan makanan bagi umat Islam. Pasal 2 Produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label atau penandaan produk pangannya bertanggung jawab atas kehalalan pangan bagi umat Islam.

Pasal 4:

- 1) Pengawasan preventif terhadap ketentuan Pasal 2 Keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim Penilai Pendaftaran Pangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Dalam tim penilai pendaftaran pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melibatkan unsur Kementerian Agama Republik Indonesia.

- 3) Pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan bersama ini dilakukan oleh pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 4) UU no. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 214 ayat 2 penjelasan butir (d) Ketentuan lain, misalnya pencantuman kata-kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang bersangkutan diproduksi dan diolah sesuai dengan kebutuhan pangan.
- 5) UU no. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pasal (34) ayat (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) dalam ketentuan ini adalah benar atau tidaknya pernyataan kehalalan dalam label atau iklan pangan, tidak hanya pada bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan penolong lain yang digunakan dalam pembuatan pangan, tetapi juga meliputi proses manufaktur.

Pasal 56 UU No.33/2014; Pelaku bisnis yang tidak memelihara kehalalan barang atau jasa yang sudah mendapatkan Sertifikat Halal seperti mana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00.00 (dua miliar rupiah). Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang pembubuhan Tulisan Halal Pada Label Pangan dan medianya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RINo.924/Menkes/SK/VII/1996 bersama peraturan penerapannya berupa SK Dirjen POM No. IIK. 00.06.3.00568 tentang tata cara pembubuhan tulisan halal pada Label Pangan, yang antara lain menjelaskan:

1. Persetujuan pembubuhan tulisan halal pada label pangan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan POM.
2. Produk pangan harus terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Persetujuan pembubuhan label halal dikasikan setelah dilaksanakannya pemeriksaan dan penilaian oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan MUI.

4. Hasil Tim Penilai Penilai disampaikan kepada Komisfatwa MUI untuk dikeluarkan fatwa dan akhirnya diberikan sertifikat halal.
5. Persetujuan pencatatan halal diberikan oleh Direktur Jenderal Badan POM berdasarkan sertifikat halal berdasarkan MUI.
6. Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikat.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: Pasal 7 butir (b): Pelaku bisnis wajib memberikan petunjuk yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Pasal 8 ayat 1 butir (b): Pelaku bisnis tidak diperbolehkan menghasilkan dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak menjalankan ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana tercantum pada penjelasan halal pada label. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 Setiap orang yang menghasilkan atau memasukkan pangan dalam wadah ke dalam wilayah Indonesia untuk diperjualbelikan dan mengemukakan kehalalan pangan bagi umat manusia bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan dan wajib membubuhkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang menyatu dari label

Pasal 11: (1) Untuk menyokong kebenaran pernyataan kehalalan seperti halnya dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang menghasilkan atau memasukkan pangan kemasan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperjualbelikan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada lembaga inspeksi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemeriksaan seperti halnya dimaksud pada ayat (1) dikerjakan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran dari lembaga keagamaan yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Pasal 59: Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pelabelan dan periklanan dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 60: (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Menteri Kesehatan mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pemeriksaan. (2) Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan diangkat oleh

Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki. (3) Pejabat pemeriksa seperti halnya dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan. Penjelasan PP No. 69 Tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa pembubuhan tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Menurut Sampurno (2001) sanksi atas pelanggaran ketentuan pencantuman label dapat dikenakan: Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 360.000.000 untuk pelanggaran UU no. 7 Tahun 1999 pasal 34 ayat (1). Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf h. Tindakan administratif terhadap pelanggaran PP. 69 tahun 1999 yang meliputi: 1) Peringatan tertulis. 2) Larangan peredaran sementara dan atau perintah penarikan produk pangan dari peredaran. Al-Qur'an

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Sesungguhnya yang tidak memberi keputusan sesuai yang diturunkan Allah, maka mereka itu kafir” [Al-Maidah/5:44]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai manusia, makanlah yang ada di bumi yang halal dan thoyyib. Dan janganlah kamu mengikuti langkah syaiton (yang suka gemar melampaui batas atau melewati batas). Tentunya iblis yaitu musuhmu yang sebenarnya. (QS/2:168).

Hadits Ibnu Abbas mengatakan dimana Sa'ad bin Abi Waqash berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, doakan aku menjadi orang yang doanya dikabulkan oleh Allah". Rasulullah menjawab, “Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu (makan makanan halal), pasti kamu akan menjadi orang yang doanya selalu dijabah. Dan demi jiwaku berada di tangan-Nya, Sesungguhnya bila seseorang memasukkan panganan najis ke dalam perutnya, sehingga amalannya tidak diterima selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil penipuan dan riba, sehingga neraka lebih sesuai untuknya” (HR. At-Thabrani).

Masalah ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad, “Kasus yang halal itu jelas dan perkara najis yang jelas, sedangkan di antara keduanya ada kasus yang terselubung (diragukan) dan banyak orang

tidak memahaminya. Maka barang siapa yang menjauhi hal-hal yang meragukan, maka dia juga telah mensucikan marwahnya dan agamanya. Dan barang siapa tergelincir ke dalam perkara yang samar-samar, dia juga bisa tergelincir ke dalam hal yang haram. Bagaikan seorang gembala yang menggembalakan pada lokasi tempat yang tidak dibolehkan dan hampir terjebak di dalamnya. “(HR Bukhari dan Muslim).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan:

Produk yang dipasarkan ditengah masyarakat harus memiliki label halal atau label non halal agar Umat Islam percaya diri mengkonsumsi produk yang ada dipasaran dan pemerintah harus agresif dan tegas dalam penanganannya. produk yang berada di pasaran tanpa label halal atau label non halal dengan masa berlaku masih aktif.

5.2. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran produsen dalam mendaftarkan produknya agar memiliki label halal dengan cara memperbaiki regulasi dan administrasi dalam mendapatkan label halal
2. Lebih mengawasi produk-produk yang beredar baik yang sudah berlabel halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aat Hidayat, 2007, Jurnal, Psikologi Dan Kepribadian Manusia: Perspektif Al-Qur'an Dan Pendidikan Islam, STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia aathidayat@gmail.com dalam M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2007).
- Abdel Rahman Yousri, Pasar Di Dalam Islam Sistem Ekonomi, Profesor Ekonomi Islam, Universitas Alexandria, Mesir, tt.
- Adinugraha, Hendri Hermawan *, Wikan Istihika, Mila Sartika, 2017, Label Persepsi Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: Penelitian Kualitatif Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Perisai, Vol 1 (3), Oktober 2017, 180-195 ISSN 2503- 3077 (Online) Situs Web <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai> Tautan DOI: <http://doi.org/10.21070/perisai.1365> Artikel DOI: 10.21070/perisai.1365.
- Alvi Jauharotus Syukriya, Hayyun Durrotul Faridah, Jurnal, Kajian Ilmiah Dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan Dalam Syariat Islam, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo, Surabaya

- 60115 *Email:
hayyunfarida@gmail.com.
- Andriyani, 2019, Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 15, No. 2, Juli 2019 ISSN: 0216 – 3942 Website:
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JK>
Ke-ISSN: 2549 –6883, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Gedung A, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan, 15419, Indonesia, ,h.190
- Anggit Listyoningrum, Albari, 2012, Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Volume 2 No. 1, Januari 2012: 40-51 Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Eka Dewi Setia Tarigan, 2016, Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area Medan, Jurnal,Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen 47 ISSN :2407-2648 E-ISSN : 2407-263X Vol. 3 No. 1 November 2016.
- Engel, 1994, Perilaku Konsumen Jilid 1. Edisi ke Enam, Terjemahan oleh Budiyanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014.
- Muchamad Fauzi, Fatwa dan Problematika Pentapan Hukum Halal Di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia *Email korepondensi: mfuz73@gmail.com.
- Rivan Sutrisno, 2013, Perilaku Konsumen: Persepsi Religiusitas Dan Persepsi Atribut Produk Terhadap Loyalitas Produk Makanan Dan Minuman Berlabel Halal Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di Bandung, Sigma-Mu Vol.5 No.2 – September 2013 (Staf Pengajar Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung).
- Shilachul Alfinul Alim M Kholid Mawardi Aniesa Samira Bafadhal, 2018, Pengaruh Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 62 No. 1 September 2018|.
- Sulhan Abu Fitra, 2015, “Makanan Menentukan Kualitas Generasi dan Peradaban”, dalam Jurnal Halal No.

113/Mei-Juni Th.XVIII 2015, (Mei-Juni 2015).

Sucipto, Jurnal, Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin, dalam Al-Qasimi, Mau'idhah

Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Grup Media Kencana Pranada, Jakarta

Internet

Z Amanah - digilib.uinsby.ac.id 2014